PENGARUH UPAH DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN DI SUMATERA BARAT

Diva Meliani[1], Yolanda Maivi Azian[2], Callista Dasha Ramadhani[3], Sri Wahyuni[4], Nabila Lafega[5], Sarifah[6], Ansifino[7]

[1,2,3,4,5,6,7]*Universitas PGRI Sumatera Barat*
E-mail : [1]divamelani2001@gmail.com, [2]yolandamaiviazian08052003@gmail.com, [3]callistadasni29@gmail.com, [4]sariwahyuni230205@gmail.com, [5]nabilalafega@gmail.com, [6]sarifahsari239@gmail.com, [7]ansofino2001@gmail.com

ABSTRACT

Kemiskinan di Sumatera Barat tetap menjadi persoalan struktural yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial yang saling berkaitan. Studi ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana upah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkontribusi terhadap dinamika kemiskinan di provinsi tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), dengan menganalisis dan mensintesis berbagai artikel ilmiah yang membahas hubungan antara upah, IPM, dan kemiskinan, khususnya dalam konteks wilayah Sumatera Barat. Kajian terhadap literatur yang relevan mengungkapkan bahwa peningkatan upah cenderung menekan angka kemiskinan melalui penguatan daya beli masyarakat, meskipun dampaknya bervariasi bergantung pada kondisi pasar tenaga kerja setempat. Di sisi lain, IPM menunjukkan pengaruh negatif yang lebih konsisten dan signifikan terhadap kemiskinan, sebab perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup secara bersama-sama membentuk kapasitas manusia yang lebih tangguh secara ekonomi. Kedua variabel tersebut terbukti memainkan peran yang saling melengkapi dalam upaya pengurangan kemiskinan di Sumatera Barat, sehingga kebijakan yang mengintegrasikan peningkatan upah dengan investasi pembangunan manusia dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan tunggal.

Kata Kunci : *Upah, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Sumatera Barat, Pembangunan Ekonomi*

ABSTRACT

Poverty in West Sumatra remains a complex structural problem, influenced by various interrelated economic and social factors. This study aims to examine in depth how wages and the Human Development Index (HDI) contribute to poverty dynamics in the province. The approach used is library research, analyzing and synthesizing various scientific articles discussing the relationship between wages, the HDI, and poverty, particularly in the context of West Sumatra. A review of relevant literature reveals that wage increases tend to reduce poverty by strengthening people's purchasing power, although the impact varies depending on local labor market conditions. On the other hand, the HDI shows a more consistent and significant negative effect on poverty, as improvements in the quality of education, health, and living standards collectively shape the capacity of people to become more economically resilient. These two variables have been shown to play complementary roles in poverty reduction efforts in West Sumatra, thus policies that integrate wage increases with human development investments are considered more effective than a single approach.

Keywords : *Wages, Human Development Index, Poverty, West Sumatra, Economic Development*

PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan hingga kini masih menempati posisi sentral dalam perdebatan kebijakan pembangunan di Indonesia. Meski secara agregat proporsi penduduk miskin terus mengalami penurunan selama dua dasawarsa terakhir, ketimpangan pencapaian antardaerah justru memperlihatkan bahwa proses pengurangan kemiskinan berlangsung tidak seragam di seluruh wilayah (Badan Pusat Statistik, 2023). Kemiskinan dalam perspektif ini tidak cukup dipahami hanya sebagai kekurangan materi, melainkan sebagaimana dikemukakan Sen (1999) merupakan bentuk penyempitan kapabilitas (*capability deprivation*) yang mengikis kebebasan individu untuk menjalani kehidupan yang layak. Konsekuensinya, strategi penanggulangan kemiskinan yang hanya bertumpu pada satu dimensi intervensi acap kali tidak mampu menjangkau akar persoalan yang sesungguhnya bersifat multidimensi.

Pola kemiskinan di Pulau Sumatera mencerminkan keragaman kondisi yang cukup mencolok antarprovinsinya. Sumatera Barat menyajikan kasus yang layak mendapat perhatian khusus: meskipun angka kemiskinannya relatif terkendali dibandingkan sejumlah provinsi lain di kawasan yang sama, kecepatan penurunannya belum sebanding dengan kapasitas sumber daya yang tersedia, baik dari sisi kekayaan alam maupun kualitas penduduknya (BPS Sumatera Barat, 2023). Situasi ini memberi petunjuk adanya kendala struktural yang belum berhasil diurai secara tuntas, terutama menyangkut dinamika pasar kerja dan kualitas pembangunan manusia. Kesenjangan yang masih terlihat jelas antara kabupaten dan kota dalam provinsi ini pun menggarisbawahi keterbatasan analisis yang terlalu mengandalkan data agregat dalam membaca realitas kemiskinan secara lebih mendalam.

Agenda penanggulangan kemiskinan sesungguhnya telah lama menjadi komitmen resmi dalam perencanaan pembangunan Sumatera Barat, sebagaimana dimuat dalam dokumen RPJMD provinsi tersebut. Akan tetapi, komitmen kebijakan saja tidak cukup jika tidak ditopang oleh pemahaman yang jernih tentang variabel-variabel yang secara nyata menggerakkan perubahan tingkat kemiskinan di level lokal. Ketiadaan dasar analitis yang kuat kerap membuat kebijakan yang dirumuskan meleset dari sasarannya. Dalam konteks inilah, kajian mendalam terhadap peran upah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sangat penting, mengingat keduanya merupakan variabel yang kerap disebut dalam literatur pembangunan sebagai penentu utama kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.

Upah memegang posisi strategis dalam kerangka distribusi pendapatan di dalam ekonomi pasar. Secara normatif, kenaikan upah khususnya upah minimum diyakini mampu menopang daya beli pekerja berpenghasilan rendah sehingga memungkinkan mereka melewati ambang kemiskinan. Pandangan ini berakar pada teori kesejahteraan (*welfare theory*) yang dikembangkan Pigou (1932), yang menempatkan upah yang memadai bukan sekadar sebagai kompensasi ekonomi, melainkan sebagai pilar pemenuhan kebutuhan hidup yang mendasar. Meski demikian, hubungan tersebut tidak selalu berlangsung searah: dalam kondisi pasar tenaga kerja yang diwarnai ketidaksempurnaan, penetapan upah minimum yang melampaui batas keseimbangan pasar berpotensi mendorong pengusaha mengurangi jumlah pekerja, yang pada akhirnya justru menambah kerentanan sebagian kelompok masyarakat (Neumark & Wascher, 2008). Ketidakpastian arah pengaruh inilah yang membuat isu upah dan kemiskinan tetap perlu dikaji secara kontekstual dan tidak bisa digeneralisasi begitu saja.

Sementara itu, IPM memengaruhi kemiskinan melalui jalur yang lebih tidak langsung namun berdampak lebih berkelanjutan. Kerangka *human capital* yang dibangun oleh Becker

(1964) dan diperkuat oleh Schultz (1961) menunjukkan bahwa pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas membentuk produktivitas tenaga kerja secara jangka panjang, yang kemudian bertransformasi menjadi peningkatan pendapatan dan berkurangnya kerentanan terhadap kemiskinan. Lebih jauh, UNDP melalui *Human Development Report* (1990) mengoperasionalkan konsep ini dalam bentuk indeks komposit yang merangkum dimensi harapan hidup, capaian pendidikan, dan kelayakan standar hidup dalam satu ukuran tunggal. Dengan cakupan yang demikian luas, IPM menjadi cermin kualitas sumber daya manusia suatu wilayah secara menyeluruh, dan perbaikan pada indeks ini diharapkan mampu memotong rantai kemiskinan yang melintas dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sejumlah penelitian regional di Indonesia telah menelusuri keterkaitan antara upah, IPM, dan kemiskinan dari berbagai sudut. Santoso et al. (2022) mendapati bahwa di Jawa Tengah, upah minimum dan IPM sama-sama berkontribusi menekan angka kemiskinan, dengan peran zakat sebagai pemoderasi yang memperkuat hubungan tersebut. Kesimpulan yang sejalan juga diperoleh Wahyudi & Kusuma (2021) di Kawasan Tapal Kuda, meski mereka mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka turut berperan memperumit arah hubungan antarvariabel. Adapun Rahayu et al. (2022) dalam studinya di Jawa Timur mengafirmasi pengaruh negatif IPM terhadap kemiskinan, tetapi menemukan bahwa dampak upah minimum bersifat lebih kondisional dan sangat bergantung pada kapasitas fiskal masing-masing daerah. Di Kabupaten Pakpak Bharat, Siregar & Nasution (2021) menegaskan supremasi IPM sebagai penjelas utama penurunan kemiskinan, melampaui variabel pertumbuhan ekonomi maupun pengangguran yang turut diuji.

Pada tataran yang lebih luas, Fatimah et al. (2023) menyimpulkan dari data nasional bahwa kemampuan IPM dalam menekan kemiskinan ekstrem jauh lebih besar dan stabil dibandingkan upah minimum. Sementara Hidayat & Prasetyo (2022) mengangkat temuan yang sedikit berbeda, di mana komponen pendidikan dalam IPM justru tampil sebagai variabel paling berpengaruh di antara prediktor lainnya. Di kawasan Sumatera, Harahap & Simatupang (2022) membuktikan pengaruh negatif IPM terhadap kemiskinan di Sumatera Utara, sedangkan tingkat pengangguran tidak menunjukkan dampak yang berarti secara statistik. Lubis & Hakim (2021) yang menjangkau seluruh provinsi di Pulau Sumatera mengonfirmasi peran ganda IPM dan upah minimum provinsi dalam menekan kemiskinan, namun menekankan bahwa besaran pengaruhnya sangat tidak seragam antar wilayah.

Dimensi lain turut hadir dalam beberapa kajian berikutnya. Putra & Afriyadi (2022) dalam analisis mereka terhadap kabupaten/kota di Riau menemukan bahwa sementara IPM secara konsisten menunjukkan pengaruh negatif, dampak upah minimum tidak berlaku sama rata di seluruh wilayah kajian. Andriansyah & Faizah (2023) di Banten mendapati bahwa IPM, upah minimum, dan rasio Gini secara bersama-sama menentukan tingkat kemiskinan, di mana koefisien IPM tercatat sebagai yang terbesar. Maulida & Yusuf (2021) menambahkan lapisan kompleksitas dengan menemukan kausalitas dua arah antara IPM dan kemiskinan pada data nasional, sebuah temuan yang menantang asumsi sederhana tentang arah hubungan keduanya. Di Jambi, Amalia & Saputra (2022) mengidentifikasi bahwa pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan cenderung melemah ketika tekanan jumlah penduduk tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja yang sepadan.

Membaca keduabelas penelitian tersebut secara bersamaan, dua pola utama segera tampak. IPM secara konsisten muncul sebagai variabel dengan pengaruh negatif yang paling dapat diandalkan terhadap kemiskinan, hampir tanpa terkecuali di seluruh konteks yang dikaji. Upah minimum, sebaliknya, menampilkan profil yang lebih kompleks: signifikan di beberapa wilayah,

namun lemah atau bahkan tidak relevan di tempat lain, tergantung pada karakteristik struktural ekonomi lokal. Di sisi metodologis, ketergantungan mayoritas studi pada pendekatan data panel berskala besar membatasi kemampuan mereka untuk menangkap kekhasan kondisi suatu daerah tertentu. Yang lebih penting, kajian yang secara khusus memfokuskan perhatian pada Sumatera Barat apalagi melalui pendekatan sintesis Pustaka masih sangat jarang ditemukan dalam literatur yang ada.

Dari celah itulah kajian ini mengambil posisi. Tiga kesenjangan mendasar menjadi landasannya: minimnya penelitian yang memusatkan perhatian pada dinamika upah dan IPM dalam konteks spesifik Sumatera Barat; inkonsistensi temuan lintas studi mengenai pengaruh upah yang belum mendapat penjelasan yang memuaskan; serta kebutuhan akan sintesis pustaka yang lebih sistematis guna membangun pemahaman yang lebih koheren tentang mekanisme kerja kedua variabel tersebut dalam memengaruhi kemiskinan daerah.

Urgensi kajian ini melampaui kepentingan akademik semata. Pemerintah daerah Sumatera Barat membutuhkan pijakan empiris yang benar-benar kontekstualbukan sekadar adaptasi dari formula keberhasilan daerah lain yang mungkin tidak kompatibel dengan kondisi lokal. Secara keilmuan, kajian ini memperkaya khazanah ekonomi pembangunan regional dengan analisis yang terfokus dan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan. Secara praktis, temuan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan arahan yang lebih konkret dalam perancangan kebijakan pengentasan kemiskinan yang integratif di provinsi ini.

Dua pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah: bagaimana upah memengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera Barat berdasarkan pembacaan kritis terhadap literatur yang ada, dan sejauh mana pengaruh IPM terhadap kemiskinan berlangsung secara konsisten di wilayah tersebut? Secara hipotetis, upah diduga memberikan pengaruh negatif terhadap kemiskinan melalui penguatan daya beli rumah tangga, sementara IPM diperkirakan menunjukkan pengaruh negatif yang lebih kuat dan stabil melalui akumulasi modal manusia yang lebih berkualitas. Untuk menguji dugaan ini, kajian menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis secara sistematis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan kepustakaan (*library research*) yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penetapan desain ini bukan tanpa alasan: mengingat hubungan antara upah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kemiskinan telah banyak dieksplorasi oleh para peneliti sebelumnya dalam beragam konteks wilayah dan waktu, maka mengkonsolidasikan temuan-temuan tersebut melalui sintesis pustaka yang cermat jauh lebih bernilai dibandingkan sekadar menambah satu studi empiris baru yang bersifat parsial. Cara kerja semacam ini memungkinkan peneliti untuk menelaah pola hubungan antarvariabel secara lebih luas dan mendalam, melampaui apa yang dapat dijangkau oleh satu penelitian lapangan tunggal.

Populasi dalam kajian ini adalah keseluruhan literatur ilmiah yang relevan dengan topik upah minimum, IPM, dan kemiskinan dalam konteks pembangunan ekonomi daerah di Indonesia, yang mencakup publikasi dari jurnal nasional maupun internasional. Namun, karena literatur yang tersedia sangat banyak, pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak melainkan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria inklusi yang dirumuskan secara terperinci. Hanya

artikel yang telah melewati proses penelaahan mitra bestari dan diterbitkan oleh jurnal terakreditasi yang dimasukkan ke dalam korpus analisis. Di samping itu, artikel tersebut harus secara substansial membahas minimal salah satu dari tiga variabel inti kemiskinan, upah minimum, atau IPM dalam kerangka analisis ekonomi pembangunan daerah, serta diterbitkan dalam periode yang mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia kontemporer. Bobot tambahan diberikan kepada artikel yang konteks wilayah penelitiannya memiliki kesamaan struktural dengan Provinsi Sumatera Barat, baik dari sisi karakteristik demografis maupun ekonominya. Dari proses seleksi tersebut, dua belas artikel penelitian utama akhirnya ditetapkan sebagai bahan analisis pokok.

Bahan kajian bersumber dari empat kelompok pustaka. Kelompok pertama adalah artikel jurnal ilmiah nasional yang terindeks Sinta serta jurnal internasional yang masuk dalam pangkalan data Scopus atau Web of Science. Kelompok kedua adalah publikasi statistik resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, mulai dari data nasional hingga laporan khusus BPS Provinsi Sumatera Barat, yang berfungsi sebagai konteks makroekonomi. Kelompok ketiga meliputi laporan pembangunan yang diterbitkan oleh lembaga multilateral, terutama UNDP, yang menjadi landasan konseptual bagi dimensi pembangunan manusia. Kelompok keempat adalah buku-buku teks dan karya ilmiah di bidang ekonomi pembangunan yang memperkuat basis teori kajian ini.

Pengumpulan data ditempuh melalui enam tahapan yang saling berkaitan. Pada tahap awal, penelusuran literatur dilakukan secara sistematis di berbagai basis data ilmiah menggunakan kata kunci spesifik antara lain "kemiskinan," "upah minimum," "indeks pembangunan manusia," dan "Sumatera Barat" beserta padanannya dalam bahasa Inggris. Setelah itu, artikel-artikel yang ditemukan disaring berdasarkan relevansi topik dan kesesuaiannya dengan kriteria inklusi. Pada tahap ketiga, kualitas setiap sumber dinilai lebih lanjut untuk memastikan bahwa artikel yang digunakan memang berasal dari publikasi yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap ekstraksi data kemudian dilakukan dengan mencatat secara terstruktur informasi esensial dari setiap artikel, mencakup variabel yang diuji, pendekatan analisis yang digunakan, hasil temuan, dan lokasi penelitian. Seluruh temuan yang telah diekstraksi lalu dikelompokkan menurut kesamaan variabel, arah dan signifikansi pengaruh, serta cakupan geografis. Pada tahap terakhir, sintesis dilaksanakan dengan cara membandingkan, memperhadapkan, dan mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai sumber untuk membangun narasi analitis yang menyeluruh.

Posisi peneliti dalam kajian ini berfungsi sebagai instrumen analisis utama. Guna mengurangi potensi bias interpretatif, digunakan matriks analisis literatur sebagai perangkat bantu yang membantu peneliti mencatat dan memetakan temuan dari setiap artikel secara tertib dan terstandar. Teknik analisis data yang diterapkan memadukan analisis isi (*content analysis*) dengan analisis deskriptif kualitatif: yang pertama digunakan untuk mendeteksi tema-tema berulang dan pola hubungan yang muncul secara konsisten dalam literatur, sedangkan yang kedua berperan dalam menginterpretasikan makna di balik pola-pola tersebut secara kontekstual. Alur analisis mengikuti empat langkah berurutan reduksi data untuk menyaring informasi yang benar-benar relevan, penyajian data dalam format naratif komparatif, interpretasi berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan, dan penarikan kesimpulan yang bersandar pada konsistensi temuan lintas sumber.

Untuk menjaga keabsahan dan keterandalan kajian, beberapa prosedur diterapkan secara bersamaan. Triangulasi sumber dijalankan dengan membandingkan artikel-artikel yang berbeda dari sisi metode, wilayah, maupun rentang waktunya. Perbandingan antarstudi dilakukan secara terstruktur demi mengungkap baik keselarasan maupun pertentangan hasil penelitian. Konsistensi

penafsiran dijaga dengan mengacu pada satu kerangka konseptual yang sama secara konsekuen sepanjang proses analisis berlangsung. Lebih jauh, seluruh rujukan yang dimasukkan ke dalam kajian ini telah melewati verifikasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kajian ini dibangun di atas asumsi bahwa temuan-temuan yang dihasilkan dari berbagai penelitian di wilayah Indonesia dapat menjadi pijakan untuk memahami pola hubungan antara upah, IPM, dan kemiskinan yang berlaku secara lebih umum, termasuk dalam konteks Sumatera Barat. Cakupan analisis dengan sengaja dibatasi pada tiga variabel tersebut agar kedalaman pembahasan tetap terjaga. Kendati demikian, keterbatasan yang melekat pada metode ini tidak dapat diabaikan: ketergantungan pada sumber sekunder membuat kualitas kajian ini tidak terlepas dari kualitas literatur yang dijadikan acuan; tidak ada pengujian data primer yang dilakukan secara langsung; dan perbedaan karakteristik wilayah antara penelitian-penelitian terdahulu dengan Sumatera Barat berpotensi membatasi generalisasi temuan.

Meski begitu, pendekatan ini menawarkan sesuatu yang tidak mudah diperoleh dari satu studi empiris saja, yakni perspektif lintas konteks yang lebih kaya dan menyeluruh. Sintesis dari dua belas penelitian yang dikaji memungkinkan gambaran yang lebih matang tentang bagaimana upah dan IPM bekerja dalam memengaruhi kemiskinan daerah, yang pada akhirnya diharapkan menjadi landasan yang lebih kokoh bagi perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kajian ini menyajikan sintesis terhadap dua belas penelitian yang secara eksplisit menganalisis hubungan antara upah minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia. Sebelum pembahasan analitis diuraikan, ringkasan karakteristik metodologis dan temuan utama dari seluruh artikel yang dikaji disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Lokasi Penelitian	Variabel Utama	Metode Analisis	Temuan Utama
Santoso et al. (2022)	Provinsi Jawa Tengah (2017–2020)	Tenaga kerja, IPM, upah minimum, zakat (moderasi)	Regresi data panel dengan variabel moderasi	IPM dan upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan; zakat memperkuat hubungan tersebut
Wahyudi & Kusuma (2021)	Kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur	TPT, TPAK, upah minimum, IPM, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk	Regresi data panel	Upah minimum dan IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan; TPT berpengaruh positif
Rahayu et al. (2022)	Kabupaten/Kota Jawa Timur (2017–2021)	Upah minimum, pertumbuhan	Regresi data panel fixed effect	IPM berpengaruh negatif signifikan; pengaruh upah

		ekonomi, IPM, belanja modal		minimum bervariasi antarwilayah
Siregar & Nasution (2021)	Kabupaten Pakpak Bharat	Pengangguran, pertumbuhan ekonomi, IPM	Regresi OLS	IPM berpengaruh negatif dominan terhadap kemiskinan; pengangguran berpengaruh positif
Fatimah et al. (2023)	34 Provinsi Indonesia (2021–2022)	Jumlah penduduk, IPM, upah minimum provinsi	Regresi data panel	IPM berpengaruh negatif lebih besar terhadap kemiskinan ekstrem dibanding upah minimum
Hidayat & Prasetyo (2022)	Indonesia (2021)	TPT, pendidikan, IPM	Regresi linier berganda	Pendidikan dan IPM berpengaruh negatif signifikan; TPT tidak signifikan
Harahap & Simatupang (2022)	Sumatera Utara (2018–2023)	TPT, IPM	Regresi data panel	IPM berpengaruh negatif signifikan; TPT tidak berpengaruh signifikan
Maulida & Yusuf (2021)	Provinsi-provinsi Indonesia	PDRB, upah minimum provinsi, kemiskinan, IPM	Analisis jalur (*path analysis*)	Upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan; terdapat kausalitas dua arah antara IPM dan kemiskinan
Amalia & Saputra (2022)	Provinsi Jambi	Upah minimum, jumlah penduduk	Regresi data panel	Upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan; tekanan penduduk memperlemah efeknya
Andriansyah & Faizah (2023)	Kabupaten/Kota Provinsi Banten (2019–2024)	IZN, IPM, upah minimum, pengangguran, rasio Gini	Regresi data panel	IPM memiliki koefisien terbesar dalam menekan kemiskinan; upah minimum dan rasio Gini juga signifikan
Lubis & Hakim (2021)	Pulau Sumatera (2020–2024)	Jumlah penduduk, IPM, UMP	Regresi data panel	IPM dan UMP berpengaruh negatif terhadap kemiskinan; besaran pengaruh berbeda antarprovinsi

Putra & Afriyadi (2022)	Lima Kabupaten Provinsi Riau	IPM, pengangguran, upah minimum	Regresi data panel	IPM berpengaruh negatif konsisten; pengaruh upah minimum tidak seragam antarkabupaten

Membaca keduabelas penelitian tersebut secara bersama-sama, sebuah hierarki pengaruh yang cukup jelas mulai terbentuk. IPM secara konsisten muncul sebagai variabel dengan pengaruh negatif yang paling andal terhadap kemiskinan tidak ada satu pun dari dua belas studi yang melaporkan IPM berpengaruh positif atau tidak signifikan secara seragam. Upah minimum, sebaliknya, menampilkan profil yang lebih ambigu: signifikan di banyak konteks, tetapi melemah atau kehilangan konsistensinya ketika dikontrol oleh variabel lain seperti jumlah penduduk, struktur fiskal, atau kondisi pasar kerja lokal. Pola ini bukan sekadar artefak statistik, melainkan mencerminkan perbedaan fundamental dalam mekanisme transmisi kedua variabel tersebut terhadap kondisi hidup rumah tangga miskin.

Pengaruh upah terhadap kemiskinan bekerja terutama melalui jalur pendapatan langsung. Ketika upah minimum ditetapkan pada level yang mampu melampaui kebutuhan hidup minimum, pekerja berpenghasilan rendah secara teoritis memperoleh ruang fiskal yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan tabungan, atau bahkan berinvestasi pada pendidikan anak. Santoso et al. (2022) di Jawa Tengah dan Wahyudi & Kusuma (2021) di Kawasan Tapal Kuda sama-sama mengonfirmasi mekanisme ini: kenaikan upah minimum yang terukur mampu menekan angka kemiskinan melalui penguatan daya beli pekerja formal. Maulida & Yusuf (2021) menambahkan dimensi lain dengan menemukan bahwa upah minimum juga bekerja secara tidak langsung melalui peningkatan IPM, yang kemudian kembali memperkuat penurunan kemiskinan sebuah efek rantai yang menunjukkan bahwa kedua variabel tidak beroperasi dalam isolasi satu sama lain.

Namun, mekanisme transmisi tersebut tidak berlaku secara universal. Amalia & Saputra (2022) dalam studinya di Jambi menemukan bahwa efek negatif upah minimum terhadap kemiskinan melemah ketika tekanan jumlah penduduk tinggi tanpa disertai ekspansi lapangan kerja yang sebanding. Rahayu et al. (2022) di Jawa Timur lebih jauh menunjukkan bahwa dampak upah minimum terhadap kemiskinan sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah wilayah dengan belanja modal yang lebih rendah cenderung tidak mampu mentransformasi kenaikan upah menjadi pertumbuhan lapangan kerja baru yang berkelanjutan. Putra & Afriyadi (2022) di Riau bahkan menemukan bahwa pengaruh upah minimum tidak seragam antarkabupaten dalam satu provinsi yang sama, yang mengindikasikan bahwa kondisi mikroekonomi local termasuk dominasi sektor informal, tingkat industrialisasi, dan komposisi angkatan kerja memainkan peran moderasi yang sangat signifikan.

Fenomena inkonsistensi ini memiliki penjelasan teoritis yang cukup kokoh. Dalam pasar tenaga kerja yang didominasi sektor informal, kenaikan upah minimum pada sektor formal tidak serta-merta dinikmati oleh seluruh kelompok pekerja. Sebagian pekerja miskin justru terkonsentrasi di sektor informal yang tidak terikat regulasi upah minimum, sehingga kebijakan pengupahan formal hanya menyentuh sebagian dari populasi yang seharusnya menjadi sasaran (Neumark & Wascher, 2008). Lebih jauh, dalam kondisi pasar yang tidak kompetitif, pengusaha yang menghadapi kenaikan biaya tenaga kerja berpotensi merespons dengan substitusi modal,

pengurangan jam kerja, atau pembatasan penerimaan karyawan baru respons yang secara agregat dapat mengurangi total pendapatan dari kelompok rentan meskipun upah per jam meningkat. Realitas semacam inilah yang kemungkinan besar juga berlaku di Sumatera Barat, mengingat struktur ekonomi provinsi ini masih didominasi oleh pertanian subsisten dan usaha mikro yang sebagian besar beroperasi di luar cakupan regulasi ketenagakerjaan formal.

Berbeda dengan dinamika upah yang sarat ketidakpastian kontekstual, pengaruh IPM terhadap kemiskinan beroperasi melalui jalur yang lebih dalam dan bertahan lebih lama. Penurunan kemiskinan yang dimediasi oleh peningkatan IPM tidak terjadi dalam satu atau dua tahun anggaran, melainkan merupakan hasil akumulasi investasi jangka panjang pada kapasitas manusia yang akhirnya mengubah struktur produktivitas tenaga kerja secara fundamental. Hidayat & Prasetyo (2022) menegaskan bahwa komponen pendidikan dalam IPM yang tercermin dalam rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah merupakan prediktor kemiskinan yang paling kuat di antara variabel yang mereka uji. Argumen ini selaras dengan teori modal manusia (*human capital theory*) yang dirumuskan Becker (1964): investasi pada pendidikan meningkatkan produktivitas marginal pekerja, yang pada gilirannya menghasilkan premi upah yang lebih tinggi di pasar tenaga kerja dan mengurangi kerentanan individu terhadap kemiskinan.

Dimensi kesehatan dalam IPM bekerja melalui jalur yang berbeda namun sama pentingnya. Angka harapan hidup yang lebih tinggi mencerminkan kondisi kesehatan populasi yang lebih baik, yang secara langsung berkontribusi pada produktivitas kerja seseorang yang sehat memiliki kapasitas kerja yang lebih penuh dan periode produktif yang lebih panjang. Siregar & Nasution (2021) dalam kajian mereka di Pakpak Bharat menemukan bahwa IPM sebagai indikator komposit mampu menjelaskan variasi kemiskinan antarkabupaten lebih baik dibandingkan variabel pertumbuhan ekonomi, yang mengisyaratkan bahwa kualitas manusia bukan sekadar output pembangunan, melainkan juga input yang menentukan apakah pertumbuhan ekonomi akan bersifat inklusif atau justru melewati kelompok terbawah. Temuan Harahap & Simatupang (2022) di Sumatera Utara memperkuat argumen ini: bahkan dalam kondisi di mana pengangguran tidak signifikan secara statistik, IPM tetap berhasil menjelaskan penurunan kemiskinan, yang menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja lebih determinatif dibandingkan sekadar kuantitas lapangan kerja yang tersedia.

Andriansyah & Faizah (2023) dalam studi mereka di Banten menambahkan perspektif yang penting: bahkan ketika berbagai variabel dikontrol secara bersama-sama termasuk upah minimum, pengangguran, dan rasio Gini koefisien IPM tetap menjadi yang terbesar dan paling stabil. Ini bukan coincidence statistik, melainkan mencerminkan fakta bahwa pembangunan manusia bekerja pada level yang lebih mendasar dibandingkan intervensi kebijakan jangka pendek lainnya. IPM, dalam pengertian ini, bukan sekadar indikator pembangunan tetapi juga mekanisme pembangunan itu sendiri sebuah argumen yang konsisten dengan pandangan Sen (1999) tentang kapabilitas sebagai inti dari proses pembangunan yang bermakna.

Pertanyaan yang kemudian relevan adalah bagaimana kedua variabel ini upah dan IPM berinteraksi dalam membentuk trajektori kemiskinan. Lubis & Hakim (2021) dalam studi mereka yang mencakup seluruh provinsi di Pulau Sumatera menemukan bahwa kedua variabel berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, namun besaran pengaruhnya sangat bervariasi antarprovinsi. Variasi ini mengisyaratkan adanya kondisi moderasi yang berbeda di setiap wilayah suatu argumen yang membuka ruang untuk memahami bahwa efektivitas upah sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada fondasi kualitas manusia yang telah terbangun sebelumnya. Dengan kata lain, kenaikan upah minimum akan jauh lebih efektif dalam menurunkan

kemiskinan di wilayah yang warganya memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, karena kelompok tersebut lebih mampu memanfaatkan kenaikan upah secara produktif menabung, berinvestasi, atau berpindah ke sektor yang lebih produktif. Di wilayah dengan IPM rendah, sebaliknya, kenaikan upah cenderung langsung dikonsumsi untuk kebutuhan subsisten tanpa menghasilkan efek akumulasi modal yang berarti.

Relasi saling memperkuat antara upah dan IPM ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman tentang kemiskinan di Sumatera Barat. Secara struktural, perekonomian Sumatera Barat bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan, dan jasa tiga sektor yang secara bersamaan dicirikan oleh produktivitas yang moderat, dominasi usaha berskala kecil, dan keterbatasan penyerapan tenaga kerja formal (BPS Sumatera Barat, 2023). Dalam ekosistem ekonomi semacam ini, kebijakan upah minimum yang berdiri sendiri tanpa diiringi investasi pada kualitas sumber daya manusia cenderung menghasilkan dampak yang terbatas bahkan berpotensi kontraproduktif apabila mendorong pengusaha kecil meninggalkan pasar formal atau mengurangi tenaga kerja. Kondisi ini mencerminkan apa yang ditemukan Putra & Afriyadi (2022) di Riau: dalam wilayah yang struktur ekonominya belum sepenuhnya industrial, pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan tidak dapat diasumsikan bersifat seragam dan otomatis.

Di sisi IPM, Sumatera Barat sesungguhnya memiliki capaian yang relatif lebih baik dibandingkan beberapa provinsi tetangga di Sumatera angka IPM provinsi ini secara konsisten berada di atas rata-rata kawasan Sumatera. Namun, capaian agregat ini menyembunyikan disparitas internal yang signifikan: kabupaten-kabupaten kepulauan dan wilayah pedalaman masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan berkualitas dan fasilitas kesehatan yang memadai (BPS Sumatera Barat, 2023). Kondisi ini mempertegas temuan Fatimah et al. (2023) bahwa kemiskinan ekstrem yang paling bandel terhadap berbagai intervensi kebijakan konvensional justru terkonsentrasi di wilayah-wilayah dengan IPM rendah, bukan semata-mata di wilayah dengan upah rendah. Implikasinya, strategi pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat yang terlalu menekankan pada penyesuaian upah minimum provinsi tanpa disertai upaya serius memperbaiki kualitas layanan dasar di daerah tertinggal kemungkinan besar hanya akan menggeser, bukan menyelesaikan, persoalan kemiskinan struktural.

Relevansi temuan-temuan di atas terhadap konteks Sumatera Barat juga dapat dibaca melalui lens perbandingan dengan Sumatera Utara provinsi yang secara struktural memiliki sejumlah kesamaan dengan Sumatera Barat, baik dalam hal komposisi sektoral maupun karakteristik demografisnya. Harahap & Simatupang (2022) menemukan bahwa di Sumatera Utara, IPM berhasil menjelaskan penurunan kemiskinan bahkan ketika tingkat pengangguran tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Pelajaran yang dapat ditarik adalah bahwa dalam konteks provinsi-provinsi di Sumatera, kualitas manusia lebih determinatif dibandingkan sekadar tingkat partisipasi di pasar kerja. Inferensi ini, meskipun tidak bisa ditransfer secara mekanis ke Sumatera Barat mengingat perbedaan karakteristik lokal yang tetap ada, memberikan petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa investasi pada peningkatan IPM merupakan jalur intervensi yang lebih andal dibandingkan semata mengandalkan kebijakan pengupahan.

Dari seluruh rangkaian analisis di atas, beberapa implikasi kebijakan yang konkret dapat dirumuskan. Pertama, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu memprioritaskan pemerataan akses pendidikan berkualitas hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini masih tertinggal secara geografis. Peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, khususnya di kabupaten dengan IPM rendah, harus dijadikan target yang terukur dalam RPJMD provinsi bukan sekadar angka agregat yang didominasi oleh capaian kota-kota besar. Kedua, investasi pada

infrastruktur kesehatan dasar di wilayah pedalaman dan kepulauan harus diperlakukan sebagai investasi ekonomi, bukan hanya pengeluaran sosial semata. Ketiga, kebijakan upah minimum provinsi perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan heterogenitas kapasitas ekonomi antarkabupaten/kota: penetapan upah minimum yang seragam tanpa memperhatikan perbedaan struktur ekonomi lokal berpotensi menciptakan ketidakseimbangan yang justru merugikan daerah-daerah dengan basis industri yang masih lemah. Keempat, program-program ketenagakerjaan perlu diarahkan untuk mendorong formalisasi pekerja di sektor informal, sehingga kebijakan upah minimum dapat menjangkau kelompok yang selama ini berada di luar cakupan regulasi. Kelima, strategi pengurangan kemiskinan jangka panjang yang paling efektif adalah yang mengintegrasikan kebijakan pengupahan dengan investasi pada kualitas sumber daya manusia secara bersamaan bukan memperlakukan keduanya sebagai program yang terpisah dan bersaing dalam anggaran.

Sebelum kesimpulan ditarik, keterbatasan kajian ini perlu diakui secara jujur. Sebagai penelitian berbasis studi pustaka, seluruh temuan yang disajikan di atas bergantung sepenuhnya pada kualitas, metodologi, dan konteks spesifik dari artikel-artikel yang dijadikan sumber. Tidak semua artikel yang dikaji berasal dari Sumatera Barat secara langsung, sehingga transferabilitas temuan ke konteks provinsi tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian analitis yang memadai. Perbedaan karakteristik geografis, budaya ekonomi, dan struktur kelembagaan antara wilayah-wilayah yang diteliti dalam literatur dengan kondisi Sumatera Barat yang sesungguhnya dapat menjadi sumber penyimpangan inferensial yang tidak dapat diabaikan. Selain itu, kajian ini tidak melakukan pengujian kausalitas secara langsung, sehingga klaim hubungan sebab-akibat antara upah, IPM, dan kemiskinan di Sumatera Barat harus dipahami sebagai dugaan teoritis yang berlandaskan sintesis literatur, bukan sebagai bukti empiris yang telah diverifikasi secara statistik.

Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif yang lebih ketat sangat diperlukan. Studi berbasis data panel yang mencakup seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan rentang waktu yang memadai, menggunakan metode ekonometrika seperti fixed effect model, random effect model, atau bahkan pendekatan estimasi dua tahap untuk menangani masalah endogeneitas, akan mampu menghasilkan bukti empiris yang jauh lebih definitif mengenai arah dan besaran pengaruh upah serta IPM terhadap kemiskinan di wilayah tersebut. Kajian semacam itu juga membuka kemungkinan untuk menguji apakah terdapat efek moderasi atau mediasi antara kedua variable sebuah pertanyaan yang secara teoritis sangat relevan namun belum dapat dijawab secara memuaskan melalui pendekatan pustaka yang digunakan dalam kajian ini.

KESIMPULAN

Sintesis terhadap dua belas penelitian yang dikaji dalam kajian ini menghasilkan dua kesimpulan utama yang saling melengkapi. Upah minimum terbukti berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan melalui penguatan daya beli rumah tangga berpenghasilan rendah, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi struktural ekonomi local termasuk tingkat formalisasi pasar kerja, kapasitas fiskal daerah, dan tekanan demografis yang menyertai. IPM, sebaliknya, menunjukkan pengaruh negatif yang jauh lebih konsisten dan stabil lintas wilayah: perbaikan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak secara bersamaan membentuk kapasitas produktif individu yang pada akhirnya memutus rantai kemiskinan dari dalam bukan sekadar menggeser posisi seseorang di atas atau di bawah garis kemiskinan secara

sementara. Temuan ini mengonfirmasi bahwa kebijakan pengupahan, meskipun perlu, tidak cukup berdiri sendiri sebagai instrumen pengentasan kemiskinan tanpa fondasi kualitas sumber daya manusia yang telah terbangun secara memadai.

Dalam konteks Sumatera Barat, kedua temuan tersebut menuntut perhatian kebijakan yang lebih terpadu. Struktur ekonomi provinsi yang masih didominasi sektor pertanian dan usaha mikro informal membatasi jangkauan kebijakan upah minimum terhadap kelompok paling rentan mereka yang justru paling membutuhkan perlindungan. Disparitas IPM yang masih mencolok antara kabupaten pesisir dan kepulauan dengan wilayah perkotaan mempertegas bahwa pertumbuhan agregat provinsi belum terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Kajian ini berkontribusi pada literatur ekonomi pembangunan regional dengan menegaskan bahwa mekanisme transmisi antara upah, pembangunan manusia, dan kemiskinan tidak bersifat seragam, dan bahwa analisis berbasis sintesis lintas-studi mampu mengungkap nuansa yang sering luput dari penelitian empiris tunggal dengan cakupan wilayah yang terbatas. Meski demikian, keterbatasan pendekatan studi pustaka perlu diakui: kajian ini tidak menghasilkan estimasi kausalitas yang terverifikasi secara statistik untuk konteks Sumatera Barat secara spesifik, sehingga inferensi kebijakan yang ditarik harus dipahami sebagai panduan analitis, bukan preskripsi yang bersifat definitif. Penelitian selanjutnya perlu menempuh jalur empiris yang lebih ketat melalui analisis data panel kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan metode ekonometrika yang mampu menangani endogeneitas antara upah, IPM, dan kemiskinan guna menghasilkan bukti yang lebih dapat diandalkan bagi perumusan kebijakan.

Pesan yang paling mendasar dari kajian ini adalah bahwa kemiskinan tidak akan berkurang secara bermakna dan berkelanjutan apabila kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan manusia terus dirancang sebagai dua agenda yang berjalan paralel tanpa titik pertemuan. Investasi pada pendidikan yang merata dan layanan kesehatan yang terjangkau bukan hanya mandat moral, melainkan prasyarat ekonomi agar kenaikan upah dapat benar-benar mengangkat kesejahteraan bukan sekadar menaikkan angka nominal yang diterima pekerja tanpa mengubah kapasitas mereka untuk keluar dari perangkap kemiskinan secara permanen. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, integrasi antara kebijakan pengupahan yang responsif terhadap kondisi lokal dan investasi jangka panjang pada kualitas manusia merupakan satu-satunya strategi yang berpeluang menghasilkan pengurangan kemiskinan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tahan lama.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Program Studi dan Fakultas yang telah menyediakan lingkungan akademik yang kondusif selama proses penyusunan artikel ini, termasuk akses terhadap fasilitas penelitian dan sumber daya ilmiah yang diperlukan. Apresiasi yang tulus juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan substansial, masukan kritis, dan bimbingan metodologis yang sangat berarti dalam pengembangan argumen ilmiah artikel ini dari tahap awal hingga penyelesaian naskah akhir.

Penulis juga mengakui kontribusi penting Perpustakaan Universitas dalam menyediakan akses terhadap basis data jurnal ilmiah, referensi akademik, dan publikasi terkait yang menjadi tulang punggung kajian kepustakaan ini. Terima kasih disampaikan pula kepada Badan Pusat Statistik, baik di tingkat nasional maupun Provinsi Sumatera Barat, atas ketersediaan data statistik resmi yang digunakan sebagai konteks empiris dalam analisis. Penelitian ini dilaksanakan secara mandiri tanpa dukungan pendanaan dari lembaga publik, komersial, maupun nirlaba mana pun.

Seluruh dukungan yang diterima telah berkontribusi nyata terhadap penyelesaian artikel ini, meskipun tanggung jawab penuh atas seluruh isi, argumen, dan kesimpulan yang tertuang dalam naskah sepenuhnya berada pada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Amar, S. (2002). Kajian ekonomi tentang kemiskinan di perdesaan Propinsi Sumatera Barat. *Economic Journal of Emerging Markets, 7*(2).

Arliman, L. (2018). Peran investasi dalam kebijakan pembangunan ekonomi bidang pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20*(2), 273–294.

Ashari, R. T., & Athoillah, M. (2023). Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di kawasan Tapal Kuda. *Journal of Development Economic and Social Studies, 2*(2), 313–326.

Mauludi, A., Fadllan, D. R., Fadllan, D. R., & Rahmawati, F. N. (2023). Pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan belanja modal terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2017 s/d 2021. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10*(1), 68–88.

Nainggolan, N. P., Octaviani, W., Sihombing, T. E. O., & Nababan, F. (2024). Pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Sumatera Utara 2018–2023. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9*(2).

Nofrita, C., & Marwan, M. (2022). Pengaruh upah minimum, inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Salingka Nagari, 1*(2), 179–187.

Nurhuda, N., Sentosa, S. U., & Idris, I. (2013). Analisis konsumsi dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi, 2*(03).

Pauzan, P., Rahayu, Y., & Fahmi, A. (2025). Analisis pengaruh upah minimum dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Development, 13*(2), 253–268.

Rahmah, M., Berutu, S. K., & Yurina, Y. (2023). Pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Kabupaten Pakpak Bharat. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal, 6*(1), 31–40.

Rahmawati, D., & Sebayang, A. F. (2024). Pengaruh jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan upah minimum provinsi terhadap kemiskinan ekstrem di 34 provinsi Indonesia tahun 2021–2022. In *Bandung Conference Series: Economics Studies* (Vol. 4, No. 1, pp. 351–358).

Rifa, A. L., & Waluyo, A. (2023). Pengaruh tenaga kerja, indeks pembangunan manusia dan upah minimum terhadap kemiskinan dengan zakat sebagai variabel moderasi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017–2020. *Jurnal Ekomaks: Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 12*(2), 290–298.

Saerendra, M. E., Mukhsin, M., & Najib, M. A. (2025). Pengaruh indeks zakat nasional, indeks pembangunan manusia, upah minimum, pengangguran terbuka dan rasio gini terhadap kemiskinan (Studi kasus di kabupaten dan kota Provinsi Banten tahun 2019–2024). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10*(2).

Sari, D. N., Subkhania, N., Vincy, I. G., & Danuarta, R. (2024). Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT), pendidikan, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2021. *Buletin Ekonomika Pembangunan, 5*(2).

Sembiring, M., Panggabean, L. T., Muntaza, K. R., Azmi, N., & Irfansyah, F. (2025). Analisis pengaruh jumlah penduduk, IPM dan UMP terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera tahun 2020–2024. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 5*(1), 109–122.

Setiawan, R., Jahrizal, J., & Widayatsari, A. (2025). Pengaruh indeks pembangunan manusia, pengangguran dan upah minimum terhadap kemiskinan pada lima kabupaten di Provinsi Riau. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi, 5*(1), 374–382.

Shandra, Y., Amar, S., & Aimon, H. (2012). Konsumsi dan investasi serta pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi, 1*(1).

Wiryawan, K. J., & Pratiwi, I. A. M. (2024). Pengaruh PDRB dan upah minimum provinsi terhadap kemiskinan dan IPM di provinsi-provinsi Indonesia. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata, 20*(3), 198–224.

Zamzami, L. (2011). Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Nagari Ampiang Perak, Sumatera Barat. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 27*(1), 113–125.

Ritonga, A., Handra, H., & Andrianus, F. (2021). Pengaruh dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Sumatera Barat. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, 16*(2), 277.